



LKIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JOMBANG**

@DPPKBPPPA_JOMBANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Data Kepegawaian	4
1.4 Profil Aset.....	5
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Kinerja Tahun 2023	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III	12
AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	12
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	15
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RPJMD/Renstra)	16
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional.....	17
3.2 Realisasi Anggaran	18
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	18
3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya	34
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja.....	37
BAB IV.....	39
PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2023”** dengan baik dan tepat waktu.

LKjIP Tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang selama 1 (satu) tahun anggaran 2023 yaitu dari 1 Januari – 31 Desember 2023. Dengan disusunnya LKjIP ini dapat dilihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi pemerintah dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja untuk tahun mendatang.

Menyadari betapa pentingnya LKjIP bagi suatu instansi pemerintah maka penyusunannya harus didasarkan pada prinsip jujur, obyektif dan transparan, sehingga apabila ada kegiatan yang belum maksimal pelaksanaannya dapat diketahui kendala-kendalanya dan segera dapat dicarikan pemecahan atau solusinya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini. Kami menyadari LKjIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dalam penyusunan LKjIP selanjutnya.

Akhirnya semoga LKjIP Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN JOMBANG



dr. PUDJI UMBARAN, M.KP.
NIP. 19680410/200212 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur staf pada Bupati Jombang, dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPKB dan PPPA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan dibidang Keluarga Berencana adalah:
 1. Dalam pelaksanaan Program KB masih terdapat kendala banyaknya permohonan dispensasi untuk menikah pada usia dini (UU No.1 Th 1974 tentang perkawinan,usia menikah perempuan 16th, laki-laki 19 th) pada usia tersebut banyak yang sudah mempunyai anak.
 2. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.
- b. Permasalahan dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah:
 1. Kesadaran masyarakat untuk menjadi kader pada kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS masih rendah.
 2. Belum adanya bantuan modal untuk Pengembangan program UPPKS.

- c. Permasalahan dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesenjangan Gender adalah:
 1. Sebagian masyarakat belum memahami konsep gender dan implementasinya.
 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam berpolitik karena adanya kesenjangan di bidang pendidikan, ekonomi serta pengaruh sosial budaya masyarakat.
 3. Masih rendahnya ketrampilan bagi perempuan kepala keluarga.
- d. Permasalahan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:
 1. Belum semua elemen masyarakat peduli untuk melaporkan serta menangani tindak kekerasan.
 2. Masih kurang optimalnya media sosialisasi berupa media elektronik maupun media cetak.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas PPKB dan P3A dimasa datang. Adapun isu- isu strategis pelayanan Dinas PPKB dan P3A adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan calon akseptor KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) MoW BPJS yang belum bisa terlayani diakibatkan faskes lanjutan dirasa terlalu kecil biaya claim dari BPJS sehingga mengalami penolakan.
2. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
4. Belum optimalnya implementasi upaya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

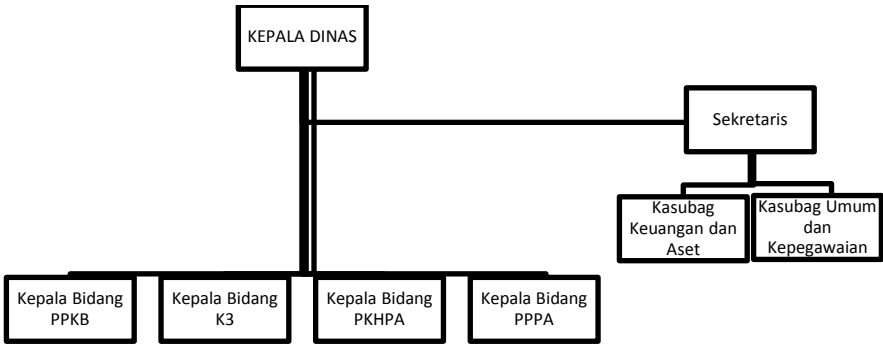
1.2 Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meliputi :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut :



Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pembinaan Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang per 31 Desember adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Orang)
STATUS KEPEGAWAIAN		
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	2
3.	Non – ASN	14
TOTAL PEGAWAI		35
JABATAN		
1.	Struktural	9
2.	Fungsional	6
3.	Pelaksana	6
4.	Non – ASN	14
PENDIDIKAN		
1.	SMP	2
2.	SMA	4
3.	D III	2
4.	D IV	1
5.	S1 (Sarjana)	15
6.	S2 (Magister)	11
GOLONGAN		
1.	IX (PPPK)	2
2.	III/a	1
3.	III/b	3
4.	III/d	4
5.	IV/a	10
6.	IV/c	1
JENIS KELAMIN		
1.	Pria	7
2.	Wanita	14
TEMPAT TINGGAL		
1.	Kabupaten Jombang	20
2.	Non – Kabupaten Jombang	1

1.4 Profil Aset

Guna Mendukung kinerja instansi, diperlukan sumber daya yang memadai, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aset untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa:

NO	URAIAN	HASIL REKON 2022	RKBMD 2023				JUMLAH	RKMBD 2024		
			PENGADAAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7	9	10	11
1	Tanah Bang. Kantor Pemerintah	2			0	0	2	2	2	0
2	Pompa Air	4			0	0	4	4	4	0
3	Station Wagon	5		1	0	0	4	5	4	0
4	Micro Bus (15-30 Orang)	1			0	0	1	1	1	0
5	Pick Up	1			0	0	1	1	1	0
6	Sepeda Motor	103		1	0	0	102	103	102	0
7	Almari Besi/Metal	6	1	1	0	0	6	6	6	0
8	Rak Besi / Metal	11	5	5	0	0	11	11	12	1
9	Rak Kayu	16	2	2	0	0	16	16	18	2
10	Filling Besi/Metal	10	2	2	0	0	10	10	11	1
11	Brandkas	1			0	0	1	1	1	0
12	Lemari Kaca	2			0	0	2	2	2	0
13	Alat Penyimpanan Lainnya / lemari kaca	1			0	0	1	1	1	0
14	Alat Penghancur Kertas	2			0	0	2	2	2	0
15	Papan Pengumuman / baliho (kec. Bareng , kabuh)	2			0	0	2	2	2	0
16	Alat Kantor Lainnya / tandon	1			0	0	1	1	1	0
17	Lemari Kayu	3			0	0	3	3	3	0
18	Meja Kayu /Rotan	21			0	0	21	21	21	0
19	Kursi Kayu / Rotan	31	10	10	0	0	31	31	31	0
20	Zice /	1			0	0	1	1	1	0
21	Meja Rapat	20			0	0	20	20	23	3
22	Meja Tulis / 1/2 biro	23			0	0	23	23	23	0
23	Meja Bundar	1			0	0	1	1	1	0
24	Kursi Rapat	24	2	2	0	0	24	24	24	0

25	Kursi Tamu	1			0	0	1	1	1	0
26	Kursi Putar	2			0	0	2	2	2	0
27	Kursi Biasa	111	49	49	0	0	111	111	111	0
28	Bangku Tunggu	3			0	0	3	3	3	0
29	Sofa	2			0	0	2	2	2	0
30	Korden	2			0	0	2	2	2	0
31	Lemari Es	2			0	0	2	2	2	0
32	Ac Sentral / DAIKIN	1		1	0	0	0	1	0	0
33	Ac Unit (LG , Daikin)	2		2	0	0	0	2	0	0
34	Ac. Split	38	5	5	0	0	38	38	48	10
35	Kipas Angin	5	5	5	0	0	5	5	7	2
36	Alat Pendingin Lainnya	2			0	0	2	2	2	0
37	Alat Dapur Lainnya / Trolly	1			0	0	1	1	1	0
38	Sound System	16			0	0	16	16	17	1
39	Lambang Garuda Pancasila	1			0	0	1	1	1	0
40	G.Presiden/Wk.P residen	1			0	0	1	1	1	0
41	Kaca Hias	1			0	0	1	1	1	0
42	Handy Cam	1			0	0	1	1	1	0
43	P.C. Unit	55	16	16	0	0	55	55	75	20
44	Lap Top	18	1	1	0	0	18	18	32	14
45	Note Book	30	24	24	0	0	30	30	45	15
46	Printer	102	58	59	0	0	101	102	102	36
47	Scanner/ RB	1	1	1	0	0	1	1	2	1
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9			0	0	9	9	9	0
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	38	5	5	0	0	38	38	38	0
50	Meja Rapat Pejabat lainnya	1			0	0	1	1	1	0
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	2	2	0	0	8	8	8	0
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	7	7	0	0	18	18	18	0
53	Kursi Rapat Pejabat	1			0	0	1	1	1	0
54	Kursi Tamu Diruangan Pejabat E	5			0	0	5	5	5	0
55	Camera+Attachm ent	3			0	0	3	3	3	0

56	Proyektor+Attach ment	19			0	0	19	19	20	1
57	Facsimile	2	1	1	0	0	2	2	2	0
58	Handphone	24			0	0	24	24	24	0
59	Publik Address (Lapangan)	11			0	0	11	11	11	0
60	Gedung Kantor Permanen	2			0	0	2	2	2	0
61	Tempat Ibadah Permanen	1			0	0	1	1	1	0
62	Bang.Ged.Perte m. Permanen / kb	19	2		0	0	21	19	21	0
63	Rtt.Gol.I Perm.Kelas III	1			0	0	1	1	1	0
64	Inst.Grd.Distr.Ka p.Sedang	1			0	0	1	1	1	0
65	Jrn.Distr.Teg.Diat as 20k	5			0	0	5	5	5	0
66	Jaringan Distribusi Lainnya	1			0	0	1	1	1	0
67	Prinjer Print / BKD	2			0	0	2	2	2	0
69	CCTV		12		0	0	12	0	12	0
70	layar Proyektor									1
71	Mic Wireles 2 Microphone									1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2023

VISI

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang untuk periode tahun 2018 – 2023 adalah : “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing“

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang adalah Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.

Tujuan

Untuk mendukung visi dan misi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai tujuan yaitu:

1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana;
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
4. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran

1. Meningkatnya Peserta KB Aktif;
2. Menurunnya Unmet need;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;
4. Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif;
5. Meningkatnya Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif;
6. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator

- 1. Persentase Peserta KB Aktif;
- 2. Persentase Unmet need;
- 3. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender);
- 4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif;
- 5. Persentase Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif;
- 6. Nilai Evaluasi SAKIP.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan tujuan Organisasi , maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama berupa target yang tercantum pada Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif
2	Menurunnya Unmet need	Persentase Unmet need
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
4	Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif
5	Meningkatnya Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif
6	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program
1	Meningkatnya data kecamatan yang terupdate tepat waktu	Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang terupdate tepat waktu

2	Tercapainya Peserta KB Aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif
3	Menurunnya Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PIKR, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif
4	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG
5	Meningkatnya layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan
6	Meningkatnya layanan korban tindak kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan
7	Meningkatnya Capaian Desa Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak
8	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tabel di bawah berikut ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	75%
2	Menurunnya Unmet need	Persentase Unmet need	Persen	11%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Persen	74%
4	Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100%
5	Meningkatnya Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100%
6	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dengan adanya kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 maka dilaksanakan Perubahan Renstra yang mengakibatkan Perubahan Sasaran Strategis pada Dinas PPKB dan PPPA, dan Pemetaan juga telah dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan PPPA yang telah disesuaikan dengan kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023. Dengan demikian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan dan melaksanakan target kinerja berupa:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	75%	$\frac{152.669 \text{ Akseptor KB}}{206.008 \text{ Pasangan Usia Subur}} \times 100$ $= 74 \%$	98,7%
2	Menurunnya Unmet Need	Persentase Unmet Need	11%	$\frac{19.075 \text{ Unmeet Need}}{206.008 \text{ Pasangan Usia Subur}} \times 100$ $= 9,3 \%$	118,2%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74%	$\frac{473 \text{ Sub Kegiatan}}{673 \text{ Sub Non Rutin}} \times 100$ $= 70\%$	94,60%
4	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	$\frac{39 \text{ laporan kasus}}{39 \text{ layanan komprehensif}} \times 100$ $= 100\%$	100%
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	$\frac{94 \text{ laporan kasus}}{94 \text{ layanan komprehensif}} \times 100$ $= 100\%$	100%
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai Evaluasi SAKIP	A (80)	BB (74,23)	92,78%

	Kinerja Instansi Pemerintah				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Keterangan:

1. Persentase Peserta KB Aktif yang telah ditetapkan sebesar 75 Persen dan sudah tercapai sebesar 74% Persen Tingkat capaiannya sebesar 98,7%. Hal tersebut dikarenakan terpenuhinya jumlah peserta KB yang dihitung dengan membagi akseptor KB Aktif dengan Pasangan Usia Subur. Adapun jumlah akseptor KB di Kabupaten Jombang 152.669 orang, sementara Pasangan Usia Subur berjumlah 206.008. Dengan demikian, tingkat persentase Peserta KB Aktif mencapai 74% dari target 75% sehingga capaian kinerja berhasil menyentuh angka 98,7%. Selain itu ada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penduduk berupa PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan aktif dalam pengendalian penduduk di 306 Desa Kabupaten Jombang, pemahaman pola pikir anggota PPKBD dan Sub PPKBD menjadikan PPKBD dan Sub PPKBD kepanjangan tangan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang. Selain itu pencapaian TFR didukung juga oleh Peserta Advokasi dan Peserta KIE yang aktif dalam menunjang Program Pengendalian Penduduk.
2. Persentase Unmet Need yang telah ditetapkan sebesar 11 Persen dan sudah tercapai sebesar 9,3 Persen sehingga tingkat capaiannya sebesar 118,2%. Penghitungan ini dilakukan dengan menghitung masyarakat unmeet need yang berjumlah 19.075 dengan pasangan usia subur yang berjumlah 206.008 sehingga capaian melebihi seratus persen tersebut dapat dilakukan dan melampaui target. Hal tersebut diatas juga didukung dengan tercapainya Pertumbuhan Akseptor KB Aktif yang ditetapkan sebesar 98,7% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jadi tingkat capaiannya sebesar 98,7%, hal ini dikarenakan telah dilakukan Advokasi KIE, Pendayagunaan Tenaga PKB/PLK, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Disamping itu untuk Presentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun yang terfasilitasi targetnya ditetapkan 100 % dan tercapai 100%. Tingkat capaiannya sebesar 100%, hal ini dikarenakan adanya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Presentase keluarga sejahtera yang telah ditetapkan sebesar 100 Persen dan sudah tercapai sebesar 100 Persen. Tingkat capaiannya

sebesar 100%. Hal tersebut diatas juga didukung dengan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan yang telah ditetapkan sebesar 74% dan sudah tercapai sebesar 70%. Tingkat capaiannya sebesar 94,60%. Hal tersebut diatas juga didukung dengan tercapainya IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yang ditetapkan sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jadi tingkat capaiannya sebesar 100 %, hal ini dikarenakan telah dilakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan jumlah OPD dan Desa yang menerapkan kebijakan yang responsive gender dan mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif yang ditetapkan sebesar 100 Persen dan sudah tercapai sebesar 100 Persen. Tingkat capaiannya sebesar 100% Hal ini dikarenakan dilakukan layanan kasus dari 39 jumlah laporan kasus dan seluruh kasus tersebut ditangani melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif yang ditetapkan sebesar 100 Persen dan sudah tercapai sebesar 100 Persen. Tingkat capaiannya sebesar 100% Hal ini dikarenakan dilakukan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selain itu juga dilakukan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Nilai Evaluasi SAKIP yang ditetapkan adalah A (80) dan sudah tercapai sebesar

BB (74,23) yang pada tahun sebelumnya sebesar 70,80%. Artinya terdapat kenaikan sejumlah 3,43% sehingga rasio ketercapaian terhadap target sejumlah 92,78%

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya				Realisasi
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	-	-	74,73	72,50%	74%
2	Menurunnya Unmet Need	Persentase Unmet Need	-	-	13%	12%	9,3%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	-	-	73,76	72,24%	70%
4	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	-	100% (29/29x100 %)	100%	100% (39/39x100 %)
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	-	96,82% (61/63x100 %)	100%	100% (94/94x100 %)
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP		70,58	70,76	70,80	74,23
7	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate	2,11	2,10	-	-	-
8	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,94	89,97	-	-	-
9	Meningkatnya layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas sesuai SPM	94	95	-	-	-

Keterangan:

Terdapat kenaikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPPA. Namun beberapa indikator tetap meraih capaian 100 persen sebab hal tersebut berkaitan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang harus terlaksana sepenuhnya dari korban yang telah ditangani oleh Dinas PPKBPPPA melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, target kinerja urusan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan capaian tiap tahunnya sehingga secara umum kinerja Dinas PPKBPPPA mengalami peningkatan.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RPJMD/Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Target Kemajuan	Target Kemajuan
1	2	3	4	5	6	6
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	74,73%	72,50%	74%	Naik 26%
2	Menurunnya Unmet Need	Persentase Unmet Need	11%	12%	9,3%	Naik 90,7%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74%	72,24%	70%	Naik 30%
4	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	Tetap
6	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	Tetap
7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	85	70,80	74,23	Naik 73,23%

Keterangan :

Pada Realisasi sasaran strategis Meningkatnya Peserta KB Aktif dengan indikator persentase peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 72,50% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 sebesar 74,73%, maka Persentase Peserta KB Aktif di harapkan naik sebesar 2,23%, Realisasi Menurunnya Unmet Need pada Tahun 2022 dengan indicator menurunnya unmet need adalah 12 % jika dibandingkan dengan target Akhir Renstra pada tahun 2023 adalah sama yaitu 11%, maka Persentase Unmet Need akan diturunkan sebesar 1%, Realisasi Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 2022 dengan indicator Indeks Pemberdayaan Gender adalah 72,24%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 74%, maka IDG ditarget akan naik sebesar 1,76%, Realisasi Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang

Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Tahun 2022 dengan indicator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah 100% dan target akhir renstra juga 100%, maka akan perlu dipertahankan pada angka yang sama, Realisasi Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Tahun 2022 dengan indicator Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah 100%, jika dibandingkan dengan target Akhir Renstra, maka Dinas PPKB,PPPA akan mengupayakan untuk mempertahankan capaian tersebut. Selanjutnya Realisasi Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2022 adalah 70,80 jika dibandingkan dengan target Akhir Rensrtra maka akan naik menjadi 85. Untuk itu perlu upaya untuk menaikkan nilai SAKIP sebesar 20,05%.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas PPKB,PPPA dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Keterangan
			DPPKBPPPA Kab. Jombang	Jatim	Nasional/ Kementrian	
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	74%	61,89%	55,36%	Diatas Jatim dan Nasional
2	Menurunnya Unmet Need	Persentase Unmet Need	9,3%	14,9%	18%	Dibawah Jatim dan Nasional
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	70%	74,42%	76,59%	Dibawah Jatim dan Nasional
4	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	97%	Setara Jatim dan diatas Nasional
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	93%	80,70%	Diatas Jatim maupun Nasional
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	74,23	-	-	

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00	3.699.750	3.699.750	100
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00	3.699.750	3.699.750	100
2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun	19 Dokumen	19 Dokumen	100,00	3.699.750	3.699.750	100
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG	73,33%	73,33%	100,00	787.418.550	769.010.384	97,66
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan Desa yang melaksanakan kelembagaan PUG	28%	28%	100,00	107.863.000	107.490.250	99,65
2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah OPD dan Desa yang di fasilitasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	61 OPD 41 Desa	61 OPD 41 Desa	100,00	60.308.400	60.301.650	99,99
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah desa yang di fasilitasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	56 Desa	56 Desa	100,00	36.725.600	36.397.600	99,11

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Kecamatan yang Aparaturnya mendapatkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100,00	10.829.000	10.791.000	99,65
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100,00	133.509.000	133.424.000	99,94
2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah lembaga perempuan yang mendapatkan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	50 Lembaga	50 Lembaga	100,00	133.509.000	133.424.000	99,94
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	100%	100%	100,00	546.046.550	528.096.134	96,71

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	2500 Orang	100,00	546.046.550	528.096.134	96,71
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100,00	161.019.188	94.224.800	58,52
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00	102.316.000	36.008.000	35,19
2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah institusi Non OPD yang difasilitasi tentang Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 institusi	72 institusi	100,00	102.316.000	36.008.000	35,19

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani sesuai SPM	100%	100%	100,00	45.905.188	45.743.500	99,65
2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani	100%	100%	100,00	17.083.188	17.055.000	99,83
2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus perempuan yang di tindaklanjuti	100%	100%	100,00	28.822.000	28.688.500	99,54
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM lembaga Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Pembinaan	40%	40%	100,00	12.798.000	12.473.300	97,46
2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan penanganan perempuan korban kekerasan yang ditingkatkan Kapasitasnya	164 Orang	164 Orang	100,00	12.798.000	12.473.300	97,46
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak	100%	100%	100,00	172.089.050	168.288.800	97,79

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah yang melaksanakan pemenuhan hak anak	100%	100%	100,00	144.416.250	140.616.000	97,37
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah institusi pemerintah dan non pemerintah yang di fasilitasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	61 desa 6 puskes mas 60 sekolah	61 desa 6 puskesm as 60 sekolah	100,00	46.899.250	46.899.250	100
2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi pemenuhan hak anak	100 orang	100 orang	100,00	97.517.000	93.716.750	96,1
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Pendamping PHA yang terlatih	36%	36%	100,00	27.672.800	27.672.800	100

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	27.672.800	27.672.800	100
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan	100%	100%	100,00	129.497.212	127.270.941	98,28
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi Pendidikan yang aktif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	100%	100%	100,00	38.973.500	36.853.500	94,56
2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah institusi pendidikan yang mendapatkan advokasi tentang Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Khusus anak	243 institusi	243 institusi	100,00	38.973.500	36.853.500	94,56
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyedia Layanan Kasus tindak kekerasan pada anak	100%	100%	100,00	55.739.212	55.711.403	99,95

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan pada anak yang dilayani	100%	100%	100,00	19.938.212	19.910.403	99,86
2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00	35.801.000	35.801.000	100
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang aktif	100%	100%	100,00	34.784.500	34.706.038	99,77
2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan anak yang dibina	306 lembaga	306 lembaga	100,00	34.784.500	34.706.038	99,77
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00	5.829.771.303	4.298.362.692	73,73

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00	16.240.000	16.225.000	99,91
2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	5.965.000	5.950.000	99,75
2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Laporan	5 Laporan	100,00	10.275.000	10.275.000	100
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00	4.551.434.803	3.135.406.997	68,89
2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup DPPKB,PPPA yang difasilitasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	4.551.434.803	3.135.406.997	68,89
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00	360.578.500	313.169.891	86,85
2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	7 Jenis	7 Jenis	100,00	2.058.200	2.058.000	99,99

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	81 Jenis	81 Jenis	100,00	53.828.300	53.760.900	99,87
2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00	196.622.000	150.592.900	76,59
2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang penggandaan dan cetakan	167 buku	167 buku	100,00	7.995.000	7.991.000	99,95
2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	2 Jenis	2 Jenis	100,00	3.720.000	3.360.000	90,32
2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	517 Kali	517 Kali	100,00	96.355.000	95.407.091	99,02
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	638.540.000	586.513.078	91,85
2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	3 Jenis	100,00	2.000.000	2.000.000	100
2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00	106.920.000	100.501.282	94
2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	18 Jenis	18 Jenis	100,00	529.620.000	484.011.796	91,39

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	262.978.000	247.047.726	93,94
2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	219 unit	219 unit	100,00	121.576.000	106.205.726	87,36
2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya DPPKB, PPPA yang dipelihara	2 Gedung	2 Gedung	100,00	78.552.000	78.137.000	99,47
2.14.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	253 Unit	253 Unit	100,00	62.850.000	62.705.000	99,77
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	92%	92%	100,00	541.355.200	494.789.967	91,4
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan data dan informasi keluarga ter update	57%	57%	100,00	541.355.200	494.789.967	91,4
2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100,00	109.200.000	102.485.000	93,85

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	21 Dokumen	21 Dokumen	100,00	79.355.200	76.846.100	96,84
2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100,00	256.800.000	250.700.000	97,62
2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	96.000.000	64.758.867	67,46
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	2.5%	2.5%	100,00	6.382.557.022	5.688.843.630	89,13
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Akseptor KB Baru	100%	100%	100,00	1.263.161.222	1.246.399.280	98,67
2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	100,00	274.765.422	273.552.500	99,56
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE	100 orang	100 orang	100,00	15.662.200	15.636.600	99,84

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dan Jenis Promosi melalui Media Radio Jumlah dan Jenis Promosi melalui media cetak Jumlah Promosi dan Jenis melalui Perbaikan Banner Baliho	6 Siar radio 2 Media Cetak 16 Banner Baliho	6 Siar radio 2 Media Cetak 16 Banner Baliho	100,00	194.933.600	194.441.400	99,75
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	100,00	273.000.000	271.950.000	99,62
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	16 Balai	16 Balai	100,00	424.800.000	412.318.880	97,06
2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	100,00	80.000.000	78.499.900	98,12
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kader IMP yang Aktif	100%	100%	100,00	1.259.474.500	1.258.915.000	99,96
2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kader IMP dan Program KKBPK Yang Dibina	2044 Kader	2044 Kader	100,00	622.800.000	622.800.000	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP dan Program KKBPk Yang difasilitasi	1204 Kader	1204 Kader	100,00	636.674.500	636.115.000	99,91
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aksesor KB Aktif	80%	80%	100,00	3.277.421.300	2.601.382.050	79,37
2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	12 Laporan	12 Laporan	100,00	56.700.000	28.433.000	50,15
2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2703 akseptor	2703 akseptor	100,00	1.484.653.300	1.036.238.300	69,8
2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 laporan	5 laporan	100,00	5.000.000	1.000.000	20
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Laporan	12 Laporan	100,00	1.700.168.000	1.504.810.800	88,51
2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	70 Laporan	70 Laporan	100,00	30.900.000	30.899.950	100

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	100%	100%	100,00	582.500.000	582.147.300	99,94
2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	9.000.000	8.897.300	98,86
2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	37 Kampung KB	37 Kampung KB	100,00	573.500.000	573.250.000	99,96
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	100%	100%	100,00	7.357.078.850	7.233.422.350	98,32
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif	100%	100%	100,00	6.964.314.000	6.901.807.000	99,1
2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah paket sarana kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi	21 Paket	21 Paket	100,00	360.000.000	352.470.000	97,91

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina	4800 orang	4800 orang	100,00	6.394.500.000	6.348.450.000	99,28
2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Kelompok	15 Kelompok	100,00	144.000.000	137.900.000	95,76
2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	660 orang	660 orang	100,00	65.814.000	62.987.000	95,7
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif	100%	100%	100,00	392.764.850	331.615.350	84,43

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang dibina	1836 orang	1836 orang	100,00	392.764.850	331.615.350	84,43
TOTAL					21.364.486.125	18.877.913.314	88,36

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang harus didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pagu anggaran program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang tahun 2023 adalah sebesar Rp.21.364.486.125,- (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah). Dengan pendanaan tersebut terealisasi sebesar Rp. 18.877.913.314,- (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah).

Dari 8 (delapan) program yang dilaksanakan, Dinas PPKBPPPA menyerap dana sebesar 88,36% dari anggaran. Hal ini disebabkan ada hambatan atau kendala dalam pencapaian target realisasi yang tidak terserap secara optimal sebesar Rp. 2.486.572.811,-. Hal ini disebabkan:

- Salah perencanaan kegiatan PPTK dan untuk tahun ke depan akan diadakan evaluasi dan perbaikan;
- Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- Perencanaan Anggaran tidak sesuai dengan Juknis. Disebabkan lebih dulu Perencanaan dari pada Juknis yang turun. Solusinya Perencanaan akan mengacu pada Juknis yang baru;

PPTK tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas yang

sudah dibuat oleh PPTK, Solusi yang diambil adalah dengan melakukan perubahan baik kegiatan maupun anggaran yang bersangkutan.

LOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	6.923.912.222	6.183.633.597	89,31
2	Menurunnya Unmet Need	Persentase Unmet Need	7.357.078.850	7.233.422.350	98,32
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	787.418.550	769.010.384	97,66
4	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	161.019.188	94.224.800	58,52
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	301.586.262	295.559.741	98,00
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	5.833.471.053	4.302.062.442	73,75

3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya

N O	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja		Capaian Kinerja %	SDM			Tk. Efisiensi
			Target	Realisasi		Kebutuhan	Kondisi Saat ini	Cakupan	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	92%	92%	100	5	1	20,00	80,00
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	2,5	2,5	100	7	3	42,86	57,14
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif	100	100	100	7	2	28,57	71,43

4..	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG	100%	100%	100	5	2	40,00	60,00
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani secara komprehensif	100%	100%	100	7	2	28,57	71,43
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa sudah menginisiasi Layak Anak	100%	100%	100	5	2	40,00	60,00
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani	86%	72%	100	7	2	28,57	71,43
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja aparatur	100%	100%	100	15	7	46,67	53,33

Dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran, maka dapat diketahui bahwa :

1. Dari anggaran yang ada, untuk sasaran strategis Meningkatnya Peserta KB Aktif ditarget Rp. 6.923.912.222,- , terealisasi Rp. 6.183.633.597,- atau 89,31%. Dengan capaian kinerja sebesar 98,7% dan penyerapan anggaran sebesar 89,31%, maka kegiatan ini mempunyai tingkat efisiensi sebesar 9,39%.
2. Dari anggaran yang ada, untuk sasaran strategis Menurunnya Unmet Need ditarget Rp. 7.357.078.850,- , terealisasi Rp. 7.233.422.350,- atau 98,32%. Dengan capaian kinerja sebesar 118,32% dan penyerapan anggaran sebesar 98,32%, maka kegiatan ini mempunyai tingkat efisiensi sebesar 20,05%.
3. Dari anggaran yang ada, untuk sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan ditarget Rp. 787.418.550,- , terealisasi Rp. 769.010.384,- atau 97,66%. Dengan capaian kinerja sebesar 94,6% dan penyerapan anggaran sebesar 97,66%, maka kegiatan ini berjalan dengan optimal.

4. Dari anggaran yang ada, untuk sasaran strategis Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif ditarget Rp. 161.091.188,- , terealisasi Rp. 94.224.800,- atau 58,52%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 58,52%, maka kegiatan ini mempunyai tingkat efisiensi sebesar 41,48%.
5. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif ditarget Rp. 301.586.262,- , terealisasi Rp 295.559.741,- atau 98%. Dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 98%, maka kegiatan ini mempunyai tingkat efisiensi sebesar 2%
6. Dan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di target Rp. 5.833.471.053,- terealisasi Rp. 4.302.062.442,- atau 73,75%. Dengan capaian kinerja sebesar 92,78% dan penyerapan anggaran sebesar 86%, maka kegiatan ini mempunyai tingkat efisiensi sebesar 19,03%.

Dilihat dari Sumber Daya Manusia berdasarkan perhitungan beban kinerja Analisis Jabatan, Dinas PPKBPPPA telah melaksanakan kinerja dengan prinsip efisiensi rata-rata di atas 50% dengan rincian:

1. Program Pengendalian Penduduk secara ideal memerlukan 5 orang, namun saat ini hanya terdapat 1 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 80% dengan cakupan 20%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 3 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 57,14% dengan cakupan 42,86%.
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 71,43% dengan cakupan 28,57%
4. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Secara ideal memerlukan 5 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 60% dengan cakupan 40%
5. Program Perlindungan Perempuan secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 71,43% dengan cakupan 28,57%.
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Secara ideal memerlukan 5 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 60% dengan cakupan 40%.

7. Program Perlindungan Khusus Anak secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 71,43% dengan cakupan 28,57%.
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara ideal memerlukan 15 orang, namun saat ini hanya terdapat 7 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 53,33% dengan cakupan 46,67%.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Tantangan dalam kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Jombang dapat dihadapi dengan beberapa solusi yang mungkin relevan:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Tantangan pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Solusi yang dapat diambil adalah melalui kampanye penyuluhan, pendidikan, dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Menggunakan berbagai media komunikasi seperti ceramah, diskusi kelompok, media sosial, dan program radio atau televisi dapat membantu menyebarkan informasi yang relevan.

2. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan program dengan efektif. DPPKBPPPA dapat mencari pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pihak swasta, organisasi non-pemerintah, atau lembaga internasional. Selain itu, upaya pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas staf, juga dapat membantu mengatasi keterbatasan tersebut.

3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor

Tantangan dalam membangun sinergi dengan lembaga dan instansi terkait dapat diatasi dengan memperkuat kerjasama lintas sektor. DPPKBPPPA dapat menjalin kemitraan dan membangun jaringan kerja dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, pihak kesehatan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak. Kolaborasi ini akan memperkuat implementasi program dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif.

4. Pengukuran dan pemantauan kinerja

Untuk memastikan keberhasilan program, penting untuk memiliki sistem pengukuran dan pemantauan yang baik. DPPKBPPPA dapat mengembangkan

sistem pelaporan dan evaluasi yang terstandarisasi untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, dapat diidentifikasi kelemahan dan kesempatan untuk perbaikan dan peningkatan program.

5. Partisipasi aktif masyarakat

DPPKBPPPA dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, atau lembaga desa yang berperan dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, akan tercipta pemahaman yang lebih baik dan keberlanjutan yang lebih tinggi.

Mengatasi tantangan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari DPPKBPPPA serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat itu sendiri. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kinerja DPPKBPPPA Kabupaten Jombang dapat meningkat dan memberikan dampak positif yang signifikan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Tahun 2023 secara umum capaian kinerjanya dapat dikatakan baik, walaupun masih terdapat hambatan/permasalahan didalam pelaksanaan kegiatan akan tetapi secara keseluruhan program dan kegiatan sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya seluruh kegiatan dan tercapainya target indikator kinerja yang ditetapkan. Namun apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian–penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Namun untuk pencapaian indikator kinerja utama untuk tahun anggaran 2023 dapat dikatakan baik. Upaya tetap dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Bupati Jombang Terpilih periode 2018-2023.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Kiranya LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya. Rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Guna mempertahankan pencapaian sasaran kinerja Menurunnya angka kelahiran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui :
 - Adanya Anggaran pelayanan KB APBD yang diberikan untuk calon akseptor KB MKJP MOW non BPJS miskin;
 - Pelayanan calon akseptor KB MKJP dengan mobil akseptor;
 - Adanya bakti sosial dengan TNI, KB Kesehatan, PKK KB Kesehatan yang dilakukan 1 tahun sekali;
 - Adanya Program dari daerah bernama Bulaga (Bupati Melayani

Warga) yang dilakukan 4 kali dalam 1 tahun.

2. Guna mempertahankan pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui :

- Keberlanjutan pelatihan/bimtek PPRG setiap tahun;
- Desk penyusunan dokumen PPRG;
- Evaluasi pelaksanaan dokumen PPRG;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Peningkatan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta lembaga pemerhati perempuan;
- Menyusun Peraturan Bupati tentang dibentuknya Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- Evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum.

3. Guna mempertahankan pencapaian kinerja meningkatnya layanan korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui :

- Meningkatkan koordinasi dengan Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak);
- Memaksimalkan kendaraan Molin dan Torlin untuk melakukan pelayanan tindak kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
- memaksimalkan pelayanan tindak kasus kekerasan pada perempuan dan anak melalui Website dan media komunikasi melalui WA.

4. Guna mempertahankan pencapaian kinerja sasaran maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditindak :

- Perlunya koordinasi dengan OPD terkait secara kontinue.
- Perlunya penyesuaian kalender akademik dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan schedule kegiatan.
- Melibatkan forum anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- Menyusun regulasi terkait pembentukan FAD, Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Kabupaten Layak Anak.

Manfaat yang diharapkan dari disusunnya LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Jombang, 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN JOMBANG



dr. PUDJI UMBARAN, M.KP.
NIP. 19680410/200212 1 006

